

BAB II

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori *Stakeholder*

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Maulida dan Adam, 2012).

Dalam mengembangkan *stakeholder theory*, Freeman (1983) dalam Susanto dan Tarigan (2013) memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan

keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, *stakeholder theory* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh *eksternal* yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Sustainability report merupakan laporan yang digunakan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004). Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya akan mendapat status dari masyarakat atau

lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi (Adhima, 2012).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Adhima, 2012). Ghazali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan.

2.3 Disclosure

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan (Chariri dan Ghazali, 2007).

Tiga konsep pengungkapan menurut Hendriksen dan Breda (1992):

1. *Adequate* (cukup)

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar informasi perusahaan tidak menyesatkan.

2. *Fair* (wajar)

Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai informasi perusahaan.

3. *Full* (lengkap)

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.

2.3.1. *Mandatory Disclosure*

Pelaporan keuangan wajib (*mandatory disclosure*) diatur dalam keputusan Ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, bahwa perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

2.3.2. *Voluntary Disclosure*

Pelaporan sukarela merupakan segala jenis pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan atau

undang-undang yang ada. Perusahaan berhak melakukan pelaporan sukarela dalam rangka memberikan informasi tambahan yang akan mempermudah pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Luas pengungkapan sukarela akan berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan (Sari, 2013).

Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela bermanfaat bagi perusahaan. Menurut Leftwich *et al.* (1981) pengungkapan informasi sukarela yang signifikan, baik keuangan maupun non-keuangan, akan menambah nilai dari informasi yang diungkapkan kepada publik. Beaver (1968) menyatakan bahwa sebuah manfaat yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak mungkin sehingga investor mampu membedakan mana perusahaan yang baik dan yang buruk.

2.4 Definisi Keberlanjutan

Makna dari keberlanjutan menurut ekonom Solow (1991) dalam Widiyanto (2011) keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi

mendatang, sehingga membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini (Susanto dan Tarigan, 2013). Menurut GRI tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

2.5 Konsep *Triple Bottom Line*

Effendi (2009) mengemukakan bahwa istilah *triple bottom line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *Cannibals With Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Elkington (1997) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu:

1. *Profit* untuk meningkatkan pendapatan perusahaan,
2. *People* untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan masyarakat, serta
3. *Planet* untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memerhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Effendi, 2009)

2.6 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI didirikan di Boston pada tahun 1997. Akarnya terletak pada organisasi non-profit Amerika Serikat, *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan *Tellus Institute*. Mantan Direktur Eksekutif CERES Dr Robert Massie, dan *Chief Executive* Dr Allen White merintis kerangka kerja untuk pelaporan lingkungan sebagai penasihat CERES di awal 1990an. Untuk mengembangkan kerangka kerja, CERES mendirikan sebuah departemen proyek bernama *Global Reporting Initiative*. Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas dan memastikan perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip CERES dalam melakukan tanggung jawab lingkungan. Investor merupakan target awal kerangka tersebut.

Versi pertama dari pedoman *sustainability reporting* diluncurkan pada tahun 2000. Tahun berikutnya, atas saran dari *Steering Committee*, CERES dipisahkan dari GRI sebagai lembaga independen. Generasi kedua dari pedoman tersebut yang dikenal sebagai G2, diresmikan pada tahun 2002 pada *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg. GRI direferensikan dalam rencana implementasi *World Summit. The United Nations Environment Programme* (UNEP) merangkul GRI dan mengundang negara-negara anggota PBB dan Belanda terpilih sebagai negara tuan rumah. Pada tahun 2002 GRI diresmikan sebagai organisasi UNEP berkolaborasi di hadapan Sekjen PBB Kofi Annan, dan pindah ke Amsterdam sebagai sebuah organisasi non-profit independen. Pada tahun 2006 GRI mengeluarkan

pedoman generasi ketiga bernama G3. Lebih dari 3.000 ahli bisnis, masyarakat sipil dan gerakan buruh berpartisipasi dalam pengembangan G3.

Layanan GRI bagi penggunanya diperluas untuk mencakup pembinaan dan pelatihan, sertifikasi perangkat lunak, bimbingan pelaporan pemula untuk usaha kecil dan menengah, dan sertifikasi laporan. Pada tahun 2011, GRI menerbitkan Pedoman G3.1 yang merupakan *update* dan penyelesaian G3, dengan bimbingan diperluas pada pelaporan jenis kelamin, masyarakat dan kinerja hak asasi manusia terkait. Dan yang paling baru pada Mei 2013, GRI merilis generasi keempat Pedomannya G4.

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) adalah organisasi Independen yang mengembangkan dan mempromosikan laporan CSR atau laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) di Indonesia. NCSR Indonesia adalah sebuah organisasi independen dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengukuran dan pelaporan atas implementasi kegiatan CSR/ keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*). NCSR didirikan pada tahun 2005 oleh 5 organisasi terkemuka di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), *Indonesian-Netherlands Association* (INA), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). NCSR tercatat sebagai anggota *Organizational Stakeholder, Global Reporting Initiative* (GRI) yang berkedudukan di Belanda dan ditunjuk oleh GRI sebagai patner pelatihan *sustainability report* untuk wilayah Indonesia, Malaysia dan Thailand.

2.7 Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)

Pelaporan keberlanjutan (*Sustainability reporting*) menurut GRI merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. *Sustainability reporting* merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial seperti *triple bottom line*.

Menurut Elkington (1997), *sustainability report* merupakan laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan praktik pengukuran penjelasan, dan menjadikan akuntabel terhadap kinerja organisasi sambil bekerja menuju tujuan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*). Sebuah laporan berkelanjutan memberikan gambaran yang seimbang dan wajar terhadap kinerja berkelanjutan dari organisasi pelapor, termasuk kontribusi positif dan negatif.

Di Indonesia walaupun sudah ada peraturan yang mengatur untuk perusahaan menyampaikan *sustainability report* (KEP-431/BL/2012) namun menurut Darwin (2008) masalah CSR merupakan masalah kebijakan sosial dan dasarnya adalah *voluntary*. Sehingga Informasi yang diungkapkan oleh setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan keputusan manajemen. Dalam

penyajian *sustainability report* perusahaan di Indonesia dapat menggunakan pedoman pengungkapan *sustainability report* yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman yang berlaku secara umum.

Dalam pembuatan *sustainability report* terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ditujukan untuk mencapai transparansi, sebuah nilai dan tujuan yang menjadi dasar dari semua aspek dalam *sustainability report*. Transparansi dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi secara lengkap atas topik dan indikator yang dibutuhkan dalam menggambarkan dampak serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan pengungkapan (GRI, 2011). Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok:

a. Prinsip pelaporan untuk menetapkan isi

- Materialitas : informasi dalam sebuah laporan harus mencakup topik dan indikator yang menggambarkan dampak signifikan dari ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap organisasi atau yang dapat mempengaruhi penilaian dan kebijakan dari pemangku kepentingan secara substantif.
- Pelibatan *stakeholder* : organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan dalam laporan cara organisasi merespons harapan dan kepentingan dari *stakeholder*.
- Konteks *sustainability*: laporan harus memperlihatkan kinerja organisasi dalam konteks *sustainability* yang lebih luas .

- Kelengkapan: cakupan topik, indikator, dan definisi batasan laporan harus menggambarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan memungkinkan *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi dalam periode laporan berjalan.

b. Prinsip pelaporan untuk menetapkan kualitas

- Keseimbangan: laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.
- Dapat diperbandingkan: isu-isu dan informasi harus dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten.
- Kecermatan: informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi.
- Ketepatan waktu: penyusunan laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler dan informasi kepada *stakeholder* tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.
- Kejelasan: informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.
- Keterandalan: informasi dan proses yang digunakan dalam penyiapan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat dibentuk kausalitas dan materialitas dari laporan.

Laporan Keberlanjutan yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut, di antaranya:

- Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja dan inisiatif sukarela;
- Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan; dan
- Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menjelaskan manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain :

1. Memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) sehingga meningkatkan prospek perusahaan dan membantu mewujudkan transparansi.
2. Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan *customer loyalty* jangka panjang.
3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. Digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.

5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas dari suatu perusahaan, sebagai penentuan sebuah perusahaan besar atau kecil dapat dilihat dari nilai total aktiva (Suryani, 2007). Ukuran perusahaan merupakan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aktiva perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan akan memunculkan pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Legitimasi ini diperlukan perusahaan sebagai jalan untuk menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Widianto, 2011). Selain itu, perusahaan besar lebih mudah diawasi

kegiatannya oleh para *stakeholder*, sehingga memberi tekanan pada perusahaan tersebut untuk melakukan praktik pelaporan yang lebih lengkap dan cepat.

2.9 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman dan Haire, 1976).

Perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki dorongan lebih kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan. Teori sinyal menyatakan bahwa ketika perusahaan menunjukkan *performance* yang bagus, maka manajemen memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan terutama informasi keuangan (Oyelere *et al.*, 2003). Perusahaan dengan kinerja buruk cenderung menghindari melakukan pengungkapan melebihi yang diwajibkan (pengungkapan sukarela) karena mereka berusaha untuk menyembunyikan *badnews*.

2.10 Tipe Industri

Tipe industri mendeskripsikan perusahaan berdasarkan lingkup operasi, risiko perusahaan serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Tipe industri diukur dengan membedakan industri *high-profile* dan *low-profile*. Perusahaan-perusahaan *high-profile*, pada umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh perhatian dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa dampak yang besar bagi masyarakat (Indrawati, 2009).

2.11 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Maulida dan Adam (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Sustainability Performance</i>	<p>Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Performance</i></p> <p>Variabel Independen: Leverage, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan, Proporsi Kepemilikan Saham oleh publik</p>	<p><i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Performance</i>, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Performance</i>. Profitabilitas dan Proporsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability</i></p>

				<i>Performance.</i>
2.	Aulia dan Syam (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	<p>Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Size, Leverage, profitability</i> dan <i>Type Industri</i></p>	<i>Size</i> dan <i>Type industri</i> berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>profitability</i> tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i>
3.	Widianto (2011)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Sustainability Report</i></p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i>, aktivitas, Ukuran perusahaan dan <i>Corporate Governance</i></p>	Profitabilitas dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Sedangkan Likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
4.	Idah (2013)	<i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Sustainability Report</i></p> <p>Variabel Independen: Dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, <i>Governance Committee</i>,</p>	Dewan direksi, <i>governance committee</i> , profitabilitas dan ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Variabel dewan komisaris, komite audit,

			Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , aktivitas dan Ukuran	likuiditas, <i>leverage</i> dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i>
5.	Nurrahman dan Sudarno (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel Dependen: <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing	Kepemilikan sahan institusional dan kepemilikan saham asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan <i>sustainability report</i> sedangkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan <i>sustainability report</i> .
6.	Nasir, Ilham dan Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar	Variabel Dependen: <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , aktifitas perusahaan, ukuran, komite audit, dewan komisaris dan <i>Governance Commitee</i>	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>Governance Commitee</i> memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> sedangkan likuiditas, aktifitas perusahaan, ukuran, komite audit dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap

				<i>Sustainability Report.</i>
7.	Prastiwi dan Puspitaningrum (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Internet Financial and Sustainability Reporting</i>	<p>Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Internet Financial and Sustainability Report</i></p> <p>Variabel Independen: Ukuran, profitabilitas, <i>leverage</i>, dan Tipe industri</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Internet Financial and Sustainability Report.</i></p> <p>Profitabilitas dan tipe industri memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Internet Financial and Sustainability Report.</i> Sedangkan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>Internet Financial and Sustainability Report.</i></p>

2.12 Pengembangan Hipotesis

Perusahaan besar lebih mudah diawasi kegiatannya di pasar modal dan di lingkungan sosial pada umumnya, sehingga memberi tekanan pada perusahaan untuk melakukan praktik pelaporan yang lebih lengkap dan cepat (Prastiwi dan Puspitaningrum, 2011). Menurut Almilia (2008) ada beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan yaitu pertama perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumberdaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage*.

Menurut Cowen *et al.* (1987) perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak aktivitas, memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, mempunyai lebih banyak pemegang saham yang boleh jadi terkait dengan program sosial perusahaan. *Sustainability report* merupakan laporan yang memberikan informasi terkait program sosial dan lingkungan perusahaan yang dirancang dan direalisasikan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka perusahaan akan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

H₁ = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*)

Penelitian yang dilakukan oleh Singhvi dan Desai (1971) dalam Almilia (2008) menggunakan 500 perusahaan besar di U.S dan memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan kualitas pengungkapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan adalah merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih

banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan (Almilia, 2008).

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman dan Haire, 1976). *Sustainability reporting* merupakan laporan yang digunakan untuk mengungkapkan informasi dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

H₂ = Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*)

Tipe industri mendiskripsikan perusahaan berdasarkan lingkup operasi, risiko perusahaan serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Tipe industri diukur dengan membedakan industri *high-profile* dan *low-profile*. Robert (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan *high-profile companies* sebagai perusahaan yang memiliki *consumer visibility*, tingkat risiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi. Perusahaan *high-profile* merupakan perusahaan yang mendapat perhatian dari masyarakat luas karena aktivitas operasinya berpotensi untuk berhubungan dengan

masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan sebagai media oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pelaporan kegiatan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) pada perusahaan membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan *high-profile* lebih tinggi dibandingkan perusahaan *low-profile*. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan *high-profile* melakukan pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang lebih banyak dibandingkan perusahaan *low-profile*.

H₃ = Tipe industri perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*)